

Peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam Program Pencegahan *Stunting*

Vina Yolanda Putri¹ Zulkarnaini²

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: vinayolandaputri@gmail.com¹

Abstrak

Stunting merupakan suatu kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang diakibatkan oleh kekurangan gizi terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Dimana kondisi gagal tumbuh pada anak balita ini disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dan pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Fenomena terjadinya kasus *stunting* di Kota Pekanbaru yaitu karena masih kurangnya minat masyarakat untuk memeriksakan kehamilan di puskesmas maupun posyandu, lalu pemahaman orang tua yang kurang mengenai bahaya *stunting*, dan masih banyak orang tua bayi yang tidak aktif dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan juga masih banyak ditemukan ibu menyusui yang bekerja dan tidak mau memberikan ASI, dimana ASI ini digantikan dengan susu formula. Dimana dalam permasalahan ini Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang menjadi salah satu pemangku kepentingan dalam pencegahan *stunting* di Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami serta analisis dan mendeskripsikan kendala dari peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam program pencegahan *stunting*. Peneliti menggunakan teori menurut Jim Ife & Frank Tesoriero (2016) yang menyatakan peran memiliki 4 dimensi yaitu peran sebagai fasilitator, peran sebagai edukasi, peran sebagai representasional, dan peran sebagai teknis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi di lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam program pencegahan *stunting* belum maksimal.

Kata Kunci: Peran, Balita, *Stunting*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu tugas pemerintah dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang tangguh dalam pembangunan nasional pemerintahan harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab bagi semua pihak untuk mewujudkannya. Salah satu ciri bangsa yang maju adalah bangsa yang mempunyai derajat kesehatan yang tinggi. Untuk itu, pembangunan kesehatan ditunjukkan untuk mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Dinas kesehatan adalah salah satu lembaga pelaksanaan pemerintah dalam bidang kesehatan dan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dinas kesehatan memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian urusan daerah dalam bidang kesehatan untuk menunjang tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan dan melakukan tugas pembantuan sesuai dengan bidangnya. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya (Mohammad, 2003).

Pemerintah Daerah sebagian dari pemerintah Nasional menurut UU 1945 diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga nya sendiri, Pembagian daerah atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahnya di tetapkan dengan Undang - Undang dengan melihat dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sidang pemerintahan negara dan hak - hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah - daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur melalui undang-undang. Kesehatan termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan wajib dan tergolong dalam pelayanan dasar. Dengan begitu berarti kesehatan menjadi hal penting yang harus dipertimbangkan dan diutamakan guna pencegahan dan penanggulangan permasalahan kesehatan yang baik untuk setiap warga negara Indonesia. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani masalah kesehatan di kota Pekanbaru adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan dibantu UPTD Puskesmas sebagai perpanjangan tangan kepada masyarakat.

Pemerintah walikota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 134 Tahun 2021 tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Dalam mengatasi dan mengurangi kasus gizi buruk di Kota Pekanbaru berupa *stunting* dan berat badan dibawah rata-rata normal, dan juga Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai upaya dalam kasus gizi buruk ini, sehingga agar dapat mencapai target hingga dibawah 1%. Selain dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukan, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru juga terus melakukan kerjasama seoptimal mungkin dengan instansi-instansi terkait yang berkaitan dalam penanganan kasus gizi buruk ini, seperti dengan puskesmas, kader di setiap daerah, maupun dengan kecamatan. Sehingga kasus gizi buruk ini selalu dapat ditangani dengan cepat, tepat, dan nantinya akan dapat mengurangi kasus gizi buruk yang ada di Kota Pekanbaru.

Gizi merupakan faktor penting yang bertujuan membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Berbagai penelitian yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa kekurangan gizi, terutama pada usia dini akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak yang kekurangan gizi akan bertubuh kurus, kecil dan pendek. Gizi kurang juga akan berdampak pada rendahnya kemampuan kognitif dan intelektual pada anak serta berpengaruh terhadap menurunnya produktivitas anak. Balita pendek atau *stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah umur lima tahun) akibat kekurangan giziz kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang dan kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 hari HPK. Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badan menurut pada umumnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku.

Program perbaikan gizi masyarakat telah berjalan puluhan tahun, namun permasalahan gizi masih cukup kompleks dan terjadi di setiap siklus kehidupan, sejak kandungan (janin) hingga usia lanjut. Permasalahan ini berada pada satu sisi, sementara pada sisi yang lain masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan dan gizi yang bermutu. Tujuan pembangunan kesehatan, seperti digariskan dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN), adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional. Pihak Kementrian Kesehatan menegaskan bahwa *stunting* merupakan ancaman utama terhadap kualitas masyarakat Indonesia. Bukan hanya mengganggu pertumbuhan fisik, anak-anak juga mengalami gangguan perkembangan otak yang akan memengaruhi kemampuan dan prestasi mereka. Selain itu, anak yang menderita *stunting* akan memiliki riwayat kesehatan buruk karena daya tahan tubuh yang juga buruk. *Stunting* juga bisa menurun

ke generasi berikutnya bila tidak ditangani dengan serius. Departemen Kesehatan telah menetapkan 5 (lima) upaya untuk mewujudkan tujuan di atas yang dirumuskan dalam Panca Karya Husada. Karya kedua dari panca karya husada yaitu pengembangan tenaga kesehatan yang diarahkan untuk menyediakan tenaga bermutu dalam jumlah dan jenis yang sesuai sehingga mampu mengadakan perubahan, pertumbuhan dan pembaharuan dalam rangka memenuhi kebutuhan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Perlunya intervensi kepada remaja putri karena sebelum kelahiran bayi, harus diperbaiki kondisi gizinya, bahkan sejak remaja. Karena nanti pada saat remaja perilaku untuk asupan gizi yang baik akan terbawa sampai dengan nanti menjadi dewasa lalu memasuki masa kehamilan. Angka *stunting* di Indonesia tergolong tinggi di ASEAN. Pada 2020, angka *stunting* anak Indonesia usia di bawah lima tahun mencapai 31,8 persen. Pada 2021, angka *stunting* menurun sebesar 24,4 persen berdasarkan data survei status gizi Indonesia. Namun, persentase itu lebih tinggi ketimbang standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni kurang dari 20 persen. Itu sebabnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menginstruksikan seluruh daerah di Indonesia menekan prevalensi tengkes menjadi nol kasus. Beliau juga mengatakan bahwa target penurunan angka *stunting* nya masih jauh dari sasaran, dimana Presiden menargetkan 14 persen tahun 2024.

Menko PMK, Muhadjir Effendy juga menambahkan, strategi pemerintah untuk mempercepat penurunan prevalensi *stunting* yaitu dengan melakukan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga harus berkomitmen memperbaiki gizi balita hingga mencegah pernikahan dini. Nabil Haroen selaku anggota DPR RI Komisi IX, menjadikan data dari Kemenkes yang menjadi rujukan untuk menganalisa kondisi *stunting* di Indonesia. Data dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita yang mengalami *stunting* di Indonesia sebanyak 24.4% pada tahun 2021. Data Kemenkes menunjukkan, bahwa hampir 25%, atau seperempat bayi di Indonesia ini berpotensi terkena *stunting*. Ini sesuatu yang berbahaya, dampaknya fatal untuk masa depan bangsa jika tidak segera ditangani. *Stunting* ini bisa menjadi bom waktu 20-30 tahun mendatang. Target penurunan *stunting* di Indonesia sudah ditetapkan sebesar 14% pada tahun 2024. Saat ini kasus *stunting* masih di angka 24%.

Menurut WHO lebih 50% kematian bayi dan anak terkait dengan gizi kurang dan gizi buruk, oleh itu masalah gizi perlu ditangani secara cepat dan tepat. Untuk penanganan kasus gizi buruk atau kekurangan gizi dalam melaksanakan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan tujuan perbaikan gizi adalah untuk meningkatkan mutu gizi perorangan dan masyarakat. Mutu gizi akan tercapai antara lain melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan professional di semua institusi pelayanan kesehatan. Salah satu pelayanan kesehatan yang penting adalah program pelayanan gizi masyarakat oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sebagai tindakan lanjut dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 diatas, maka Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menti Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan terkait upaya perbaikan gizi, pada Pasal 142 dinyatakan mengenai "Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan: a. Bayi dan balita; b. Remaja perempuan; dan c. Ibu hamil dan menyusui.

Pemerintah bertanggung jawab menetapkan standar angka kecukupan gizi, standar pelayanan gizi, dan standar tenaga gizi pada berbagai tingkat pelayanan. Pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kecukupan gizi pada keluarga miskin dan dalam situasi darurat. Pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan dan informasi yang benar

tentang gizi kepada masyarakat. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan upaya untuk mencapai status gizi yang baik. *Stunting* merupakan masalah kesehatan masyarakat yang harus ditangani secara serius. Indonesia adalah negara dengan prevalensi *stunting* kelima terbesar. Balita/baduta (bayi dibawah usia dua tahun) yang mengalami *stunting* akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat berisiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas *stunting* akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan.

Stunting pada anak menjadi permasalahan karena berhubungan dengan meningkatnya risiko terjadinya penyakit – penyakit kronis dan kematian, gangguan pada perkembangan otak, gangguan terhadap perkembangan motorik dan terhambatnya pertumbuhan mental anak. Pertumbuhan tidak optimal dalam masa janin dan atau selama periode 1000 HPK memiliki dampak jangka panjang dimana bila faktor eksternal (setelah lahir) tidak mendukung, pertumbuhan *stunting* dapat menjadi permanen hingga anak tumbuh sebagai remaja pendek. Remaja putri telah mendapatkan intervensi berupa pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) untuk remaja yang ada disekolah. Namun ada sebagian remaja putri yang masih belum teratur mengonsumsi tablet tambah darah meskipun telah mendapatkannya karena kurangnya motivasi diri ataupun minat remaja putri tersebut untuk mengonsumsi tablet tambah darah tersebut. Disamping itu partisipasi masyarakat (ibu balita) untuk datang ke Posyandu masih rendah disebabkan banyak posyandu yang tutup sejak pandemi *Covid -19* sehingga kegiatan pemantauan tumbuh kembang balita tidak maksimal dan sebagian ibu balita tidak mau membawa balitanya lagi ke posyandu karena imunisasi anaknya sudah lengkap. Masih ada balita yang belum mendapat imunisasi dasar secara lengkap. Faktor ekonomi keluarga yang menyebabkan kurangnya asupan gizi pada anak dan masih rendahnya kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Stunting dapat dicegah melalui pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) khususnya, di kelompok Bina Keluarga Balita (BKB). Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan pengasuhan balita dengan rincian yaitu 270 hari masa kehamilan, 730 hari setelah kelahiran sampai anak usia 2 tahun. Ini merupakan metode emas bagi pertumbuhan fisik dan perkembangan otak sang buah hati. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam program pencegahan *stunting*. Untuk mengetahui faktor penghambat peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam program pencegahan *stunting*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian ini merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian ini kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Data ini dihasilkan dari tulisan maupun lisan dan sudut pandang yang sedang diamati. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, di Jl. Abdul Rahman Hamid, Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru Gedung B2, Kecamatan Tenayan Raya. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru karena yang memiliki andil dan wewenang dalam pelaksanaan program perbaikan gizi di Kota Pekanbaru ini adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara. Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah

- respondenya sedikit/kecil. Sutrisno Hadi (2014) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode wawancara adalah sebagai berikut: Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
2. Observasi. Sutrisno Hadi (2003) mengemukakan bahwa, Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang di amati tidak terlalu besar.
 3. Dokumentasi. Menurut Sugiyono (2018:82), Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan dan pengumpulan data yang di indentifikasikan dari dokumentasi adalah yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti penulis. Dokumentasi merupakan bentuk fisik dari penelitian ini, berupa foto-foto penelitian dan surat-surat yang telah diperoleh selama penulis melakukan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam Program Pencegahan *Stunting* di Kota Pekanbaru

Permasalahan *stunting* kini menjadi salah satu fokus utama presiden dimana hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dikarenakan semakin meningkatnya kasus *stunting* yang terjadi di Indonesia. Pada BAB II tentang strategi nasional percepatan penurunan *stunting* disebutkan bahwa : “ *Dalam rangka percepatan penurunan stunting, ditetapkan strategi nasional percepatan stunting dimana bertujuan untuk : menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi* ”. Dalam mewujudkan program percepatan penurunan kasus *stunting* di Indonesia, permasalahan *stunting* dilaksanakan dibawah kewenangan Kementerian Kesehatan, untuk diwilayah kota Pekanbaru, kewenangan mengenai permasalahan *stunting* yaitu di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Untuk menganalisis peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, maka peneliti mengacu pada 4 aspek peran yang dikemukakan oleh Jim Ife & Frank Tesoriero (2016), yaitu:

Peran Fasilitatif

Pada indikator ini, menurut pengertian yang dikemukakan oleh Jim Ife & Frank Tesoriero (2016), penulis mengkaji bagaimana peranan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam program pencegahan *stunting* yaitu seperti memfasilitasi kegiatan – kegiatan pencegahan *stunting* baik berupa tindakan – tindakan, program, maupun pelatihan – pelatihan sebagai bentuk dukungan nyata bahwa kegiatan maupun program pencegahan *stunting* ini sama rata dikalangan masyarakat dan dapat dirasakan oleh berbagai kalangan dalam upaya mencegah *stunting* pada bayi. Untuk merealisasikan program – program maupun fasilitas – fasilitas seperti pertemuan rutin, kegiatan pelatihan – pelatihan pendanaannya berasal dari Dinas Kesehatan sendiri. Sejak tahun 2021, terdapat pendanaan khusus untuk *stunting* yang disebut DAK (Dana Alokasi Khusus) Non Fisik *Stunting* – BOK dimana kegunaannya untuk mendanai kegiatan – kegiatan pertemuan serta koordinasi di Tim TPPS. Anggaran–anggaran yang diberikan dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru itu sendiri digunakan untuk mendanai program – program *stunting* seperti program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), program pemeriksaan Hemoglobin

(HB) untuk remaja, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD), serta untuk keluarga yang beresiko terkena *stunting*. Puskesmas Limapuluh juga melakukan kegiatan pemantauan secara berkala terhadap balita, baik yang terkena *stunting* maupun yang sehat, dimana dilakukan setiap pertemuannya dilakukan pengecekan tinggi dan penimbangan berat badan balita hingga balita nya berusia 2 tahun. Pada bayi yang terkena *stunting*, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru memberikan bantuan berupa pemberian biskuit sebagai tambahan makanan untuk bayi yang terkena *stunting*. Dimana 1 bayi diberikan 1 kardus biskuit yang didalamnya berisi 4 kotak atau 84 bungkus. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru memberikan bantuan kepada masyarakat terutama dalam permasalahan *stunting*, yaitu memberikan bantuan makanan bergizi yaitu seperti pemberian biskuit tambahan dan susu formula untuk bayi. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru ada memberikan bantuan langsung selain biskuit dan susu formula yaitu berupa bahan makanan yang bergizi seperti telur, beras dan lainnya.

Peran Edukasi

Dalam indikator ini, berdasarkan pengertiannya peran edukasi yaitu suatu proses berupa membantu pelaksanaan kegiatan peningkatan produktivitas, mengembangkan potensi diri individu, memberikan masukan dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan serta pengalaman dimana dapat dilakukan melalui pembelajaran maupun pelatihan. Dalam hal ini peran sebagai edukasi memiliki kaitan erat dengan sosialisasi atau promosi suatu program ataupun kegiatan ke masyarakat dimana hal ini bermanfaat bagi masyarakat nya. Peran edukasi juga dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi ke masyarakat baik berupa materi ilmu maupun penyuluhan pengenalan kegiatan dan program sehingga nantinya dapat membantu meningkatkan kesadaran diri masyarakat akan pentingnya mencegah bayi terkena *stunting*, memberikan informasi penting terkait *stunting* baik pencegahan maupun penanggannya, pentingnya menjaga pola hidup agar bayi tidak terkena *stunting*, dan lainnya. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melalui Puskesmas Lima Puluh telah melakukan upaya – upaya pencegahan *stunting* melalui sosialisasi dan juga melakukan pengecekan status gizi bayi, pemberian edukasi langsung ke masyarakat mengenai tata laksana gizi buruk. Namun hasil dari edukasi ini semua kembali lagi ke masyarakatnya sebagai *output* penerima edukasi apakah mereka melakukan anjuran sesuai dengan yang di infokan maupun di edukasikan oleh pihak Dinas Kesehatan bersama Puskesmas dan Posyandu ataupun mengabaikannya. Puskesmas Limapuluh selaku intervensi sensitif, dimana Puskesmas melakukan pengecekan dan penimbangan berkala kepada bayi yang terkena *stunting*. Puskesmas Lmapuluh melakukan pemeriksaan rutin terhadap bayi *stunting* minimal 1 kali pertemuan dalam sebulan. Dimana tiap pertemuannya diberikan juga edukasi langsung. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bersama puskesmas sudah malakukan edukasi ke masyarakat secara langsung, namun untuk memastikan respon masyarakat apakah mereka memahami dan mengikuti arahan dari pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru berdasarkan paparan materi yang disampaikan dapat dilihat dari bagaimana pola hidup masyarakat itu lagi. Apakah setelah pemberian edukasi ini mereka menerapkannya sehingga anak mereka menjadi lebih sehat atau hanya sekedar mendengarkan dan tidak merubah perilakunya. Hal ini juga bisa diliat dari perkembangannya bayi nya nanti, apakah tinggi badan dan status gizinya sudah lebih baik atau tetap sama malah cenderung semakin buruk. Konseling dan penimbangan rutin ini sangat membantu ibu – ibu dalam mendapatkan pengetahuan atau ilmu baru yaitu bagaimana untuk meningkatkan gizi anak dan meningkatkan tumbuh kembang anak agar semakin bagus serta mengetahui bagaimana progress perkembangan gizi anak.

Peran Representasional

Peran representasional sendiri memiliki pengertian yaitu peran sebagai perwakilan dari masyarakat dimana dalam peran representasional ini dapat berupa interaksi dengan pihak lainnya untuk kepentingan masyarakat serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini harus dilakukan agar dapat mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Dimana dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melakukan kerja sama dengan pihak lain, memanfaatkan media massa untuk melakukan penyuluhan dan promosi secara online. Dalam peranan ini, Dinas Kesehatan telah berupaya untuk mendukung dan merealisasikan upaya implementasi program pencegahan *stunting* yaitu dengan melakukan beberapa cara antara lain seperti memanfaatkan media massa untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahayanya *stunting*, bagaimana pencegahannya dan penanganannya, menghimbau dan mengajak masyarakat untuk turut berkontribusi dalam mensukseskan program penurunan *stunting* tersebut yaitu dengan cara rajin memeriksakan kandungannya ke puskesmas terdekat, mengajak masyarakat untuk menjaga pola hidup, menjaga kebersihan sanitasi, dll. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melakukan beberapa kerja sama baik lintas program maupun lintas sektor dimana contoh kerja sama dengan lintas program yaitu seperti kerja sama dengan Seksi Promosi Kesehatan, dimana mereka bertugas membantu dibagian edukasi, promosi, media massa, ada juga kerja sama dengan bagian Kesehatan Lingkungan yaitu dengan masalah sanitasi, lingkungan tempat tinggal nya. Untuk kerja sama lintas sektor yaitu seperti kerja sama dengan Dinas Pendidikan, dimana kerja sama ini yaitu untuk mensukseskan kegiatan aksi bergizi berupa pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri baik di SMP maupun SMA yang ada dikota Pekanbaru. Contoh kerja sama lainnya yaitu dengan Kementerian Agama, dimana calon pengantin diarahkan untuk melakukan screening masalah kesehatan, diberikan edukasi mengenai reproduksi, kehamilan, dll. Untuk kerja sama lintas sektor yaitu dengan OPD lain seperti Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dll.

Peran Teknis

Dalam peran teknis, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru memiliki peranan yang berkaitan dengan kemampuan pegawai Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengumpulan data, analisis data, kemampuan penggunaan komputer maupun teknologi terkini dan juga kemampuan dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Peran – peran ini dapat dilakukan dengan cara seperti mengumpulkan informasi dan data yang dapat digunakan untuk Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru baik untuk mengembangkan potensi pegawainya tetapi juga data – data yang relevan dimana data tersebut diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan – permasalahan seperti kasus *stunting* tersebut. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melakukan pengambilan data dengan beberapa cara, yaitu survey langsung kelapangannya jika tenggat waktu untuk pengambilan datanya masih banyak, jika turun kelapangan langsung data yang didapat semakin banyak dan dapat di analisis secara langsung datanya sehingga lebih akurat, pendataan yang didapat melalui puskesmas – puskesmas dan juga data yang dilakukan dengan cara survey melalui google form dimana google form ini nantinya akan diberikan ke kader – kader seperti lurah lalu disebarkan ke masyarakat melalui kader tersebut, lalu dari sana lah dapat diambil data – data yang dibutuhkan sehingga dapat dilakukan analisis data. Setelah proses pencarian data ini, data akan di analisis dan di bagi ke kelompoknya. Misalnya seperti hal penimbangan bayi, akan dibagi menjadi bayi bertubuh pendek dan sangat pendek. Dinas Kesehatan telah melakukan pendataan berdasarkan realita dilapangannya meskipun belum terlaksana dengan optimal, namun Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru tetap mengusahakan agar pendataan tersebut dapat terlaksana dengan menyeluruh dan akurat.

Kendala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam Program Pencegahan *Stunting* di Kota Pekanbaru

Dalam Peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam Program Pencegahan *Stunting*, peneliti menyimpulkan juga memiliki beberapa kendala yang dialami Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam proses pelaksanaan pencegahan *stunting*nya seperti sebagai berikut:

1. Keinginan orang tua yang kurang untuk memeriksakan kandungan dan balita ke puskesmas. Dimana hal ini menjadi kendala besar bagi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru untuk memperoleh data dikarenakan data yang dibutuhkan menjadi sedikit, sedangkan untuk mendapatkan data *stunting* sendiri di peroleh melalui pengukuran dan penimbangan di posyandu maupun puskesmas di Kota Pekanbaru. Hal ini juga membuat sasaran untuk data *stunting* menjadi sulit didapatkan karena prosedurnya melalui pelaporan oleh posyandu dan puskesmas dimana data ini pelaporannya berasal dari data yang terdaftar menggunakan aplikasi, dan diaplikasi ini pendataannya di input dengan sistem *by name dan by address* dan hal ini juga menjadi kendala lainnya yaitu tidak terpenuhinya kuota sasaran program yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
2. Sosial media Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru tidak *update*. Namun, dalam hal penyuluhan dan pemberian edukasi secara online yaitu melalui sosial media, masih kurang bagus. Berdasarkan keterangan dari Ibu Riska Yunita, S.Gz, selaku Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi menyatakan bahwa seksi Promosi Kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru tidak memiliki 1 tenaga ahli IT khusus untuk menangani sosial media sehingga sosial media Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru tidak sering update. Akun instagram Dinas Kota Pekanbaru terakhir mereka memposting kegiatannya yaitu pada tanggal 10 Agustus 2023. Lalu kita juga dapat lihat dari profil facebook Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, bahwasanya disana terakhir memposting pada tanggal 22 Februari 2023. Dari 2 akun sosial media ini, dapat dilihat bahwa isi dari postingan ke 2 akun tersebut kebanyakan hanya berisi dokumentasi kegiatan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru saja. Untuk edukasi ada, tapi minim, dan tidak pernah di up lagi postingan mengenai edukasinya seperti pamflet online dimana berisi pengetahuan umum berupa narasi mengenai kesehatan, maupun pamflet ajakan yang menarik untuk memeriksakan diri ke puskesmas terdekat.
3. Permasalahan internal antar lintas program Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru memiliki permasalahan internal nya yaitu masih kurangnya koordinasi dan kerja sama antar lintas program yang ada di dalam Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru itu sendiri. Dimana permasalahan *stunting* hanya dibebankan ke bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi saja karena adanya anggapan bahwa kasus atau permasalahan *stunting* ini hanya program dari bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi saja, tetapi seharusnya kasus *stunting* ini dikerjakan bersama – sama sesuai tupoksi masing – masing bidang dan tidak hanya dibebankan kepada Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi saja agar permasalahan *stunting* ini dapat di tanggulangi bersama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan yang diperoleh terkait peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dimana terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi terkait pencegahan program *stunting*nya, maka dari itu peneliti akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitiannya serta sarannya yaitu sebagai berikut: Peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam Program Pencegahan *Stunting* di Kota Pekanbaru ini masih belum maksimal dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari 4 dimensi peran yaitu: peran sebagai fasilitatornya sudah optimal karena kegiatan yang sifat memfasilitasi berjalan dengan baik yang mana dapat dilihat dari pembagian biskuit tambahan, susu formula untuk

bayi dan terjalannya kelas ibu hamil. Dilihat dari peran sebagai edukasinya terlaksana secara optimal terbukti dengan adanya konseling dan edukasi yang diberikan secara langsung, serta dengan mengikuti anjuran dan arahan dari dokter, berat badan anak yang melakukan konseling semakin bertambah dan kondisi gizinya semakin membaik. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang terlaksana telah memberikan hasil positif dalam memperbaiki kondisi kesehatannya., peran sebagai representasional belum optimal karena informasi-informasi yang berasal dari media masa seperti facebook dan instagram tidak mengunggah informasi mengenai edukasi stunting maupun edukasi kesehatan lainnya, dan peran sebagai teknis sudah dengan optimal dapat dilihat dari pendataan yang dilakukan secara rutin. Oleh karena itu peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam Program Pencegahan *Stunting* dikatakan cukup optimal.

Dalam pelaksanaan program pencegahan *stunting* di Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal, dimana dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dialami Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru seperti : permasalahan internalnya dimana kasus *stunting* ini dibebankan sepenuhnya ke bagian Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, lalu permasalahan eksternal seperti ada nya program pencegahan *stunting* yaitu program aksi bergizi ini dimana adanya pihak sekolah yang menolak kunjungan program ini, padahal program ini dilakukan sesuai acuan dari KEMENKES RI dengan juga mendatangkan tenaga kesehatannya juga tidak hanya pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru saja, lalu masih kurangnya promosi maupun pemberitahuan terkait program *stunting* di sosial media, dimana hal ini dikarenakan tidak adanya ahli IT khusus untuk menangani sosial media, padahal saat ini semuanya sudah serba digital, tapi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru kenyataannya tidak aktif mengedukasi dan melayani masyarakat di sosial media.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan diatas, peneliti ingin menguraikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam Program Pencegahan *Stunting* di Kota Pekanbaru. Berikut saran yang diberikan oleh peneliti: Dinas Kesehatan perlu aktif memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan Instagram untuk menyebarkan informasi edukasi tentang stunting dan kesehatan lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat konten yang informatif, menarik, dan relevan. Juga, pastikan untuk menjawab pertanyaan dan memberikan dukungan kepada masyarakat yang mengajukan pertanyaan di media sosial. Dinas kesehatan perlu merekrut ahli IT atau spesialis media sosial Mengingat pentingnya peran media sosial dalam pendidikan dan promosi kesehatan saat ini, pertimbangkan untuk merekrut atau bekerjasama dengan ahli IT atau spesialis media sosial yang dapat membantu dalam mengelola platform sosial media. Mereka dapat membantu dalam merancang strategi, membuat konten yang efektif, dan menjawab pertanyaan masyarakat. Terkait masalah internal uang terjadi perlu melakukan Penyusunan tim yang efektif Dalam mengatasi permasalahan internal, Dinas Kesehatan dapat mempertimbangkan untuk mendistribusikan beban pekerjaan terkait stunting kepada lebih banyak seksi atau unit dalam organisasi. Ini akan mengurangi beban bagi Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, dan memungkinkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan stunting.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, F. D. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemerintah Kota Pekanbaru Mengenai Pemenuhan Hak Anak Di Kota Pekanbaru (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau*).
- Anggraheni, Titis Sukma. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Di Desa Talang Mulya Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Diss. Universitas Islam Riau, 2018. Hal.22.

- Arief, I. S., & Zulkarnaini, Z. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Dikelurahan Maharatu Kota Pekanbaru (*Doctoral dissertation, Riau University*).
- Bagong, Suyanto. 2005. Metode Penelitian Sosial. Hal.127. Jakarata : Kencana Prenanda Media Group.
- Baturangka, T., Kaawoan, J., & Singkoh, F. (2019). Peran Dinas Sosial Kota Manado Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas. *Jurnal Eksekutif*, 3 (3).
- D., Rosa P. S., et al. "Efektivitas Program Keluarga Berencana dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Pekanbaru." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, vol. 1, no. 2, Oct. 2014.
- Deslyanto, Muhamad, and Sujianto. "Peranan Dinas Sosial dan Pemakaman dalam Pembinaan Anak Terlantar di Kota Pekanbaru." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, vol. 3, no. 2, Oct. 2016, pp. Hal.1-14.
- Domili, I., Tangio, Z. N., Arbie, F. Y., Anasiru, M. A., & Labatjo, R. (2022). Pola Asuh Pengetahuan Pemberian Makan Pada Balita *Stunting*. *Jurnal GIZIDO*, Vol.14 (1 Mei), 83-91.
- Fallo, A. R. (2020). Implementasi Kebijakan Pencegahan *Stunting* oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan di Kecamatan Kie. *Glory: Jurnal Ekonomi & Ilmu Sosial*, 1(2-Des), 1-21.
- Giroth M, Lekie. 2014. *Status Dan Peranan Pendidikan Pamong Peraja Indonesia*. Hal. 25-27. Bandung : CV Indra Prahasta.
- Gumelar, I. S. (2018). Peran Dinas Kesehatan Dalam Menanggulangi Gizi Buruk Anak Di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Caraka Prabhu*, 2(1), 60-77.
- Haifulloh, R., Purnomo, E. P., & Salsabila, L. (2020). Kehadiran Kartu Smart Madani dan Kartu Identitas Anak sebagai Program Pengembangan Smart City di Kota Pekanbaru. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 3(1), 038-047.
- Hetzer, E. 2012. *Central and Regional Government*, Jakarta: Gramedia
- Ife, Jim & Frank Tesoriero. 2016. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Inu Kencana Syafie, 2015, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Ivancevich, John M, Robert Konopaske dan Michael T. Matteson. 2005. *Perilaku dan Manajemen organisasi (Jilid 2)*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Jantia, R. U., & Ridwan, M. U. (2015). Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan Tahun 2010-2014. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(1).
- Karding, Abd. Kadir. (2008). Evaluasi pelaksanaan program Bantuan operasional sekolah (BOS) Sekolah menengah pertama negeri Di kota semarang. Semarang : Universitas Diponegoro
- Khairiyah, N., & Zulkarnaini, Z. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana Oleh Baznas di Kabupaten Kampar. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 3(3), 258-266.
- Lestari, W., Kristiana, L., & Paramita, A. (2018). *Stunting: Studi Konstruksi Sosial Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan Terkait Gizi dan Pola Pengasuhan Balita di Kabupaten Jember*. *Jurnal Aspirasi*, 9(1), 17-33.
- Melati, M., & Zulkarnaini, H. (2021). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir Pengaraian. *Journal Publicuho*, 4(1), 19.
- Nasrah, H., Irdyanti, I., Nesneri, Y., & Hidayati, F. (2021). Implementasi Program Jaring Pengaman Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pekanbaru. *Jurnal El-Riyasah*, 11(2), 119-138.

- Nawawi, Hadari. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk bisnis yang kompetitif*, Hal. 174, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari. 2018. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Hal 1-2, Yogyakarta: Gajah. Mada University Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jilid I, Yogyakarta : PT. Rineke Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 2018. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru, Jilid 1-*. Hal.53. Jakarta : Rineka Cipta.
- Novianti, R., Purnaweni, H., & Subowo, A. (2021). Peran Posyandu Untuk Menangani *Stunting* di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 378-387.
- Nuheriana, A., Rate, S., Yusuf, K., Musdalifah, M., & Intang, N. (2022). Pengaruh Penyuluhan Gizi Dengan Media Leaflet Terhadap Pengetahuan Dan Tindakan Ibu Anak Yang *Stunting*. *Jurnal GIZIDO*, Vol. 14(1 Mei), 42-53.
- Nurillah, Romaduti Sari. Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Padang Dalam Meningkatkan Wisata Mice Di Kota Padang. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP* Vol. 5: Edisi II Juli – Desember 2018. Hal.4.
- Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi
- Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan terkait upaya perbaikan gizi
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 tahun 2021 konvergensi tentang pencegahan dan penurunan *stunting*
- Putra, F. Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Banjir Tahun 2017. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2), 1-15.
- Putri, Della Maiyoza. Peranan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Dalam Memberdayakan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Bengkalis. Diss. Universitas Islam Riau, 2018. Hal.24.
- Putri, E. N., & Nurcahyanto, H. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan *Stunting* Di Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(2), 68-85.
- Rahmadhani, N. (2018). Hubungan pemberian ASI eksklusif dengan perkembangan bahasa awal anak usia 6 bulan. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FKp*, Vol. 5 No. 2 (Juli-Desember) 2018
- Raho Bernard. 2007, Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.
- Saputri, Imelda Tri. Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Covid-19 Di Desa SemeSepting Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Diss. Universitas Islam Riau, 2022. Hal. 21-22.
- Siagian, Sondang P, 2006, *Organisasi Kepemimpinan Dan Prilaku Administrasi*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta.
- Situmorang, Victor. M. 1993, *Hukum Administrasi Pemerintah di Daerah*, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi*, Hal.212 & 441, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2016. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Hal 268-269. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujianto. 2008. Implementasi Kebijakan Publik “Konsep, Teori dan Praktik”. Pekanbaru: Alaf Riau
-

- Sutrisno, Hadi. (2003 : 106). Metodologi Research. Jilid 1, 2, UGM. Sebagaimana dikutip oleh Sugiyono dalam bukunya yang berjudul "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D". CV. Alfabeta, Bandung 2013.
- Syahputra, R. (2015). Peran dinas kesehatan kota dalam pencegahan penyakit HIV/AIDS di Kota Samarinda. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 1-15.
- Wardana, A. K., & Astuti, I. W. (2019). Penyuluhan pencegahan *stunting* pada anak. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 1(2), 170-176.
- Widayanti, S. (2012). Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis (Welfare Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2012). *Welfare Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2012.
- Wulan, Sari.Dewi. 2009. Sosiologi (Konsep dan Teori). Bandung:PT. Resika Aditama.
- Yuliarti, V., & Irdyanti, I. (2016). Peran Dinas Kota Pekanbaru dalam menanggulangi dampak kabut asap kebakaran hutan di Kota Pekanbaru. *Kutubkhanah Kutubkhanah: Jurnal Penelitian sosial keagamaan*, Vol.19, No.1 Januari-Juni 2016, syafi15-34